BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perseteruan yang terjadi antara Israel dan Palestina merupakan salah satu tragedi cerita klasik dalam dunia politik international. Keinginan Palestina untuk mendirikan negara berdaulat di tepi barat dan jalur Gaza serta Yarusalem Timur mendapatkan reaksi negatif dari Israel. Pada tahun 1967 Palestina berkeinginan mengambil wilayah yang telah dikuasai Israel, namun perang yang berlangsung selama enam hari membuat Palestina mengalami kekalahan sehingga beberapa dari wilayah mereka dikuasai Israel. Perang Enam Hari telah menjadi dimulainya fase baru konflik antara Israel dan Palestina, sejak konflik menciptakan ratusan ribu pengungsi dan membawa lebih dari satu juta warga Palestina di wilayah pendudukan di bawah kekuasaan Israel ((Hodali, 2017)

Konflik yang telah berlangsung sangat lama ini telah menyita perhatian masyarakat dunia. Menurut Condoleezza Rice yang merupakan mantan menteri luar negeri Amerika, pada konferensi perdamaian Timur Tengah November 2008 memperediksikan penyelesaian konflik Israel-Palestina sebagai “pekerjaan sulit namun bukan berarti tidak dapat ditempuh dengan kerja keras dan pengorbanan” . Namun pada kenyataannya perdamaian antara kedua sisi tersebut memang sulit diwujudkan. Pada akhir 2008 yang dimana telah diprediksikan oleh dunia Internasional dan pernyataan Amerika bahwa akhir 2008 adalah puncak penyelesaian konflik Israel dan Palestina akan tetapi tidak sesuai prediksi bahkan malah sebaliknya (Paat, 2013).

Perang di Gaza yang terjadi pada tahun 2009, 2012 dan 2014 telah menyebabkan banyak korban jiwa dan kerusakan yang parah sehingga warga Palestina harus menjadi

pengungsi. Perang yang memuncak terjadi pada tahun 2014 di Jalur Gaza yang di perkirakan sekitar 520.000 warga Palestina kurang lebih 30% populasi Gaza menjadi pengungsi, 273.000 di antaranya mengungsi di berbagai tempat seperti misalnya sekolah. Kejadian tersebut menyebabkan penduduk Palestina banyak membutuhkan bantuan, dimana salah satunya dengan keterbatasan persediaan makanan sangat terbatas sehingga sangat dibutuhkan bantuan persediaan pangan darurat, selain itu penduduk juga membutuhkan banyak bantuan fasilitas kesehatan. Kerusakan yang terjadi pasca perang menyebabkan banyak ratusan bangunan yang rusak total dan ada sebagian yang rusak akan tetapi masih layak untuk di tempati, selain banyaknya kehancuran bangunan yang terjadi akibat perang, penduduk gaza juga terkena dampak keterbatasan atau kekurangan persediaan air dan juga tenaga listrik (Khosla, 2014).

Akibat agresi militer Israel terhadap jalur Gaza tidak hanya menimbulkan banyak korban jiwa, akan tetapi berpengaruh terhadap bencana perekonomian. Kerugian ekonomi mengakibatkan kerugian besar, dan beberapa fasilitas perusahaan listrik mengalami kerusakan total. Pasca serangan Israel yang terakhir pada tahun 2014 lalu terhadap Jalur Gaza menyebabkan Palestina sangat membutuhkan bantuan pembangunan dalam jumlah yang besar.

Perang yang terjadi antara Israel dan Palestina banyak menarik perhatian berbagai pihak, bukan hanya dari masyarakat muslim akan tetapi hampir dari seluruh penjuru dunia. Kekejaman agresi militer Israel menyebabkan Palestina menjadi korban yang membuat dunia prihatin dan simpati dengan keadaan kondisi Palestina saat ini.

Swedia merupakan salah satu negara dunia yang juga memberikan perhatian penuh terhadap perkembangan konflik antara Palestina dan Israel. Pengakuan kedaulatan oleh pemerintah Swedia pada 30 Oktober 2014 merupakan bukti kontribusi pemerintah Swedia terhadap isu tersebut. Pemerintah Swedia melalui Menteri Luar Negeri Swedia Margot Wallstrom secara resmi mengakui kedaulatan Palstina

sebagai negara merdeka dan hal Ini merupakan langkah penting yang menegaskan hak Palestina untuk menentukan nasib sendiri. Dengan kebijakan Swedia mengakui kedaulatan Palestina tersebut menjadikan Swedia sebagai negara Uni Eropa pertama mengakui kedaulatan Palestina (Jemadu, 2014). Meskipun sebenarnya, beberapa negara-negara lain telah mengakui kedaulatan Palestina, sebelum akhirnya negara-negara tersebut bergabung ke dalam negara Uni Eropa, ialah negara Hungaria, Polandia, dan Slovakia (Asfar, 2014). Adapun tujuan dari pengakuan Swedia terhadap Palestina adalah mendukung kelompok moderat Palestina dan membuka solusi perdamaian atas konflik yang berkepanjangan antara Palestina dan Israel. Selain itu, Swedia juga memiliki niat baik untuk membantu kehidupan perekonomian yang mandiri untuk Palestina.

Pada tanggal 10 Februari 2015 Presiden Palestina, Mahmoud Abbas, secara resmi membuka Kedutaan Besar Palestina di ibukota Stockholm Swedia, sebagai bentuk dari perjanjian kerjasama yang telah disepakati oleh kedua negara. Peresmian kedutaan besar Palestina ini merupakan bagian dari perjanjian kerjasama pembangunan antara kedua negara, setelah sebelumnya Palestina hanya dapat mendirikan kantor diplomasi di negara Skandinavia tersebut (Zahid, 2015) . Tercatat dalam hubungan kerjasama tersebut, pemerinath Swedia bersedia mendanai pembangunan lembaga-lembaga sosial, pendidikan, dan infrastruktur Palestina di wilayah Tepi Barat. Perlu diketahui bahwa ini merupakan kedutaan besar pertama Palestina di wilayah Eropa, setelah pemerintah Swedia secara resmi mengakui Palestina sebagai negara merdeka dan berdaulat pada 30 Oktober 2014. Langkah pemerintah Swedia tersebut kemudian disusul oleh parlemen beberapa negara Eropa seperti Inggris, Perancis dan Spanyol pada akhir tahu 2014 lalu, dalam sebuah resolusi tidak mengikat kepada pemerintah yang mendukung mengakui negara Palestina (Zahid, 2015).

Dukungan Swedia terhadap kedaulatan Palestina dari sisi ekonomi bukanlah problem serius bagi Swedia. Menurut

PDB (Pendapatan Domestik Bruto) per kapita Swedia merupakan negara terkaya ketujuh di dunia dan memiliki standar hidup tinggi yang dirasakan oleh warga negaranya. Swedia memiliki sumber daya alam utama yaitu, bijih besi, kayu, dan tenaga air, oleh sebab itu Swedia bisa dikatakan sebagai negara ekonomi campuran berbasis ekspor. Di Swedia Sektor rekayasa menyumbang 50% keluaran dan ekspor, sedangkan ada juga yang sangat penting seperti telekomunikasi, otomotif, dan farmasi. Swedia adalah pengekspor senjata terbesar kesembilan di dunia. juga sangat penting. Swedia adalah pengekspor senjata terbesar kesembilan di dunia. (WorldEconomicForum, 2013).

Pada level domestik, dukungan Swedia juga tidak terlepas dari pengaruh kelompok muslim di Swedia. Agama Islam adalah agama kedua di Swedia setelah Kristen. Islam di Swedia memiliki sejarah akar yang cukup kuat. Di negara monarki ini memiliki eksistensi risalah samawi berawal pada abad ke-18. Ketika itu, Kekhalifahan Ottoman bersekutu sama negara yang berbatasan dengan Norwegia di sebelah barat. Persekutuan tersebut membuat Raja Swedia Carl |XII berada di bawah bayang-bayang perlindungan Dinasti Ottoman (Zuhri, 2014). Oleh karena itu faktor kedekatan tersebut yang kemudian menjadi alasan mendasar, mengapa Swedia memberikan kebebasan beragama kepada umat Islam meski muslim adalah minoritas. Pada tahun 1970 merupakan puncaknya, saat Swedia membuka pintu untuk para imigran, umat muslim berbondong-bondong datang ke negara yang bergabung dengan Uni Eropa pada 1995 itu. Swedia adalah salah satu negara maju yang menampung imigran dari Tmur Tengah, terutama Iran dan Irak (Zuhri, 2014).

Melihat keadaan Palestina yang semakin terpuruk, blokade Gaza dan isolasi daerah Tepi Barat yang menghambat pembangunan pertanian dan perdagangan, serta upaya untuk menyediakan akses ke air. Keadaan ini mendorong kelompok muslim di Swedia menekan pemerintah untuk memberikan dukungan dan bantuan terhadap Palestina.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di paparkan penulis akan mengajukan pokok permasalahan yang akan diteliti dalam penyusunan skripsi ini. Adapun rumusan masalah yang diangkat oleh penulis adalah:

"Bagaimana pengaruh kelompok muslim dalam mendukung kebijakan luar negeri Swedia untuk pro-Palestina ?"

C. Kerangka Pemikiran

Agar dapat mendeskripsikan bagaimana kelompok muslim Swedia dalam membantu pembangunan di Palestina, penulis menggunakan teori maupun konsep dalam ranah Ilmu Hubungan Internasional. Hal ini bertujuan agar dalam penelitian ini dapat semakin terarah dan terkonsep dengan jelas. Adapun Teori atau konsep yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

1. Pluralist Model

Pemikiran pluralisme pertama kali muncul pada masa yang disebut Pencerahan (Enlightenment) Eropa, tepatnya pada abad ke-18 M, masa yang disebut sebagai titik permulaan bangkitnya gerakan pemikiran modern (Inpas, 2010). Masa ini diwarnai dengan gagasan-gagasan baru pemikiran manusia yang berorientasi pada superioritas akal rasionalisme dan pembebasan akal dari kungkungan doktrin agama. Kemudian munculah paham liberalisme yang di dalamnya memuat gagasan tentang kebebasan, toleransi, persamaan dan keragaman atau pluralisme. Pluralisme berakar dari paham liberalisme yang berkembang pada abad ke-18 M di Eropa.

Model pembuatan kebijakan luar negeri menurut Karen Mingst Pluralist Model. Model ini juga berasal dari pemikiran Liberalisme dan menjadi alternatif dari kedua model yang pertama. Pluralist Model melihat pengambilan kebijakan bergantung pada negosiasi atau tawar-menawar domestik opini publik, kelompok kepentingan, perusahaan multinasional, dan gerakan sosial. Keempat unsur ini bisa disebut sebagai *pressure groups* (Asharif, 2015).

Dalam situasi yang non-kritis dan isu-isu sosial ekonomi dimana kelompok kepentingan memiliki peran yang cukup besar biasanya menggunakan Pluralist Model. Kelompok kepentingan dan gerakan sosial memiliki banyak cara untuk menyetir kebijakan sesuai kepentingan mereka. Mereka dapat memobilisasi media dan opini publik, melobi badan-badan pemerintah, mempengaruhi dewan perwakilan, mengorganisasi jaringan transnasional dengan kepentingan yang sama, dan bahkan untuk perusahaan multinasional (MNC) mereka dapat menghubungi langsung kepala negara dan pejabat tinggi.

Model pluralist ini tersusun secara non hirarkis dan kompetitif. Dimana kekuasaan dari badan-badan negara tidak terpisahkan dari proses tawar menawar tanpa akhir antara kelompok-kelompok yang mewakili kepentingan yang berbeda-beda sesuai dengan harapan awal komunikasi tersebut dijalin (Held, 2006).

Kebijakan yang diambil pada akhirnya merefleksikan strategi dan kepentingan tiap kelompok yang berbeda-beda yang bernegosiasi untuk mencapai kepentingan bersama. Hal ini sejalan dengan perspektif Liberalisme yang melihat setiap kepentingan kelompok dapat diakomodir dengan kerjasama.

Gambar 1.1. Pluralis Model

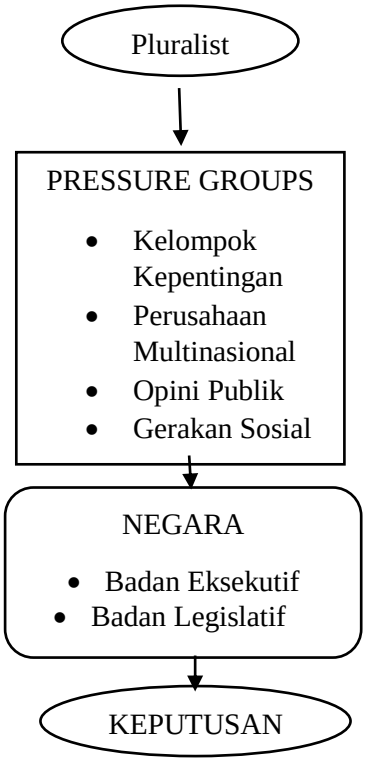

(Sources:*https://hiluscious.com/proses-pembuatan-kebijakan-luar-negeri*)

Issue konflik Israel dan Palestina merupakan issue yang populer di Swedia, Swedia merupakan salah satu negara dunia yang juga memberikan perhatian penuh terhadap perkembangan konflik antara Palestina dan Israel, Perhatian

publik Swedia atas konflik Israel Palestina mulai meningkat sejak salah satu majalah ternama Swedia mempublikasikan artikel yang menyatakan kekejaman tentara Israel terhadap warga Palestian (Boudreaux, 2009).

Pembingkaian berita oleh majalah tersebut memengaruhi opini publik Swedia, Sejak publikasi majalah tersebut meluas, aksi demonstrasi menentang serangan Israel terhadap Palestina digelar di beberapa tempat di Swedia (Wester, 2009). Kelompok muslim Swedia dan berbagai kelompok kepentingan domestik lainnya melakukan aksi demonstrasi secara damai di Swedia. Aksi ini dilakukan pada peristiwa internasional yang memancing perhatian publik, aksi demonstrasi ini tidak hanya dilakukan oleh kalangan muslim saja yang tergabung dalam kelompok kepentingan yang memang secara tegas memperjuangkan kemerdekaan Palestina, melainkan juga dari berbagai elemen warga Swedia sendiri yang tergabung dalam serikat buruh dan warga Swedia lainnya.

Melalui kelompok muslim yang berafiliasi dengan berbagai kelompok kepentingan lainnya yang memiliki peran penting dalam mempengaruhi opini publik Swedia . Partai Sosial Demokrat Swedia dengan janji kampanyenya apabila menduduki kursi eksekutif akan mengakui Palestina sebagai negara. Dengan liputan media massa yang begitu masif dan informasi yang realtime mengenai dinamika konflik Israel Palestina, konstituen domestik Swedia mampu memengaruhi pembuat kebijakan. (NNN, 2014)

Bagi konstituen domestik Swedia, janji kampanye Partai Sosial Demokrat merupakan alternatif kebijakan yang perlu didukung dengan memilih partai tersebut ketika pemilihan umum agar dapat mengimplementasikan janji kampanyenya. Sebaliknya, bagi Partai Sosial Demokrat, tuntuntan konstituen domestik untuk memerjuangkan kemerdekaan Palestina merupakan momentum politik yang bisa dimanfaatkan untuk dukungan elektoral dalam pemilihan umum lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi publik dalam aksi demonstrasi ini cukup luas. Tidak hanya kelompok muslim, namun juga

berbagai elemen lain seperti serikat buruh dan warga negara Swedia lainnya yang bergabung dalam aksi demonstrasi. Selain aksi demonstrasi, kelompok muslim Swedia dan berbagai kelompok kepentingan ini juga melakukan boikot terhadap produk-produk perusahaan Israel. dan perusahaan Swedia yang melakukan kerjasama dengan Israel.

Gerakan Solidaritas Internasional yang pro Palestina juga mengampanyekan boikot, divestasi dan sanksi (BSD) terhadap Israel. Selain menggerakkan aksi demonstrassi dan boikot di kalangan akar rumput, gerakan ini juga aktif melakukan lobi kepada elit pemerintah untuk memengaruhi kebijakan luar negeri Swedia. Selain lobi, organisasi ini juga menyediakan informasi dan laporan kepada pemerintah dalam pembuatan kebijakan (NGO, 2015).

2. Konsep Legitimasi

Legitimasi penguasa adalah suatu keyakinan anggota masyarakat untuk menaati dan menerima kebijakan yang dibuat oleh penguasa serta segala hal yang ada pada rezim penguasa tersebut (David Easton). Legitimasi merupakan sebuah konsep yang mampu melahirkan sebuah hubungan di antara pemimpin dan masyarakat yang dipimpinnya. Di dalam sebuah pemerintahan negara, legitimasi dianggap penting bagi pemimpin pemerintahan karena para pemimpin ini akan selalu berupaya keras untuk mendapatkan atau mempertahankan legitimasi tersebut. Kebanyakan orang berpendapat bahwa, adanya legitimasi yang dimiliki oleh seorang pemimpin bisa memicu kestabilan politik dan memungkinkan terjadinya perubahan sosial. Hal tersebut juga dipercaya dapat membuka kesempatan yang semakin lebar bagi pemerintah untuk tidak hanya memperluas bidang-bidang kesejahteraan yang akan ditangani, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas kesejahteraan itu sendiri yang pada umumnya menjadi tugas utama dari sebuah pemerintahan (Pengertian Legitimasi, 2016).

Legitimasi mencakup kemampuan menghasilkan dan menjaga kepercayaan bahwa institusi institusi politik yang dibentuk atau yang sudah ada adalah yang paling cocok bagi masyarakat (Lipset, 1960). Konsep legitimasi atau keabsahan yang merupakan hal utama yang paling penting dalam suatu sistem politik. Keabsahan adalah keyakinan anggota-anggota masyarakat bahwa wewenang yang ada pada seseorang, kelompok atau penguasa adalah wajar dan patut dihormati, kewajaran ini berdasarkan persepsi bahwa pelaksanaan wewenang itu sesuai dengan asas-asas dan prosedur yang sudah diterima secara luas dalam masyarakat dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan prosedur yang sah. Jadi, mereka yang diperintah menganggap bahwa sudah wajar peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh penguasa dipatuhi. Dalam hubungan ini dikatakan oleh David Easton bahwa keabsahan adalah : "Keyakinan dari pihak anggota (masyarakat) bahwa sudah wajar baginya untuk menerima baik dan menaati penguasa dan memenuhi tuntutan-tuntutan dari rezim itu (The conviction on the part of the member that it is right and proper for him to accept and obey the authorities and to abide by the requirements of the regime) (Budiardjo P. M., 2008).

Dilihat dari sudut penguasa, dapat disebut di sini ucapan A.M Lipset: "Legitimasi mencakup kemampuan untutk membentuk dan mempertahankan kepercayaan bahwa lembaga-lembaga atau bentuk-bentuk politik yang ada adalah yang paling wajar untuk masyarakat itu (Legitimacy includes the capacity to produce and maintain a belief, that the existing political institutions or forms are the most appropriate for the society) (Budiardjo P. M., 2008).

Jika dalam suatu sistetem politik terdapat konsensus mengenai dasar-dasar dan tujuan-tujuan masyarakat, keabsahan dapat tumbuh dengan kukuh, sehingga unsur paksaan serta kekerasan yang dipakai oleh setiap rezim dapat ditetapkan sampai minimum. Maka dari itu pimpinan dari suatu sistem politik akan selalu mencoba membangun dan

mempertahankan keabsahan di kalangan rakyat karena hal itu merupakan dukungan yang paling mantap.

Pemerintah Swedia mendukung Palestina dan meningkatkan bantuan karena adannya faktor tuntutan dari masyarakat muslim dan konstituen domestik di Swedia, oleh karena itu pemerintah Swedia mengakomodir tuntutan tersebut agar mendapatkan legitimasi dari masyarakat domestik.

D. Argumen Utama

Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah dan kerangka pemikiran yang digunakan dan telah dijelaskan diatas, maka penulis menarik argumen bagaimana kelompok muslim Swedia mempengaruhi pemerintah untuk membantu pembangunan di Palestina adalah :

1. Kelompok muslim Swedia berafiliasi dengan konstituen domestik lainnya untuk memberikan tekanan terhadap partai SDP yang merupakan the ruling party di Swedia agar memberikan dukungan terhadap Palestina.
2. Pemerintah Swedia mengakomodir tuntutan untuk memberikan dukungan terhadap Palestina dengan meningkatkan bantuan agar pemerintah Swedia mendapatkan legitimasi dari publik domestik Swedia.

E. Tujuan Penelitian

Adapun dalam sebuah penelitian ilmiah senantiasa terdapat tujuan penelitian. Oleh sebab itu terdapat beberapa tujuan dalam penellitian ini diantaranya adalah :

1. Penulisan ini bertujuan untuk menjelaskan lebih dalam mengenai bagaimana pengaruh kelompok muslim Swedia dalam menekan pemerintah Swedia untuk mendukung Palestina.
2. Penelitian ini menjadikan salah satu sarana penulis untuk mengaplikasikan teori-teori yang

telah penulis pelajari selama mengikuti proses perkuliahan dan menjadi salah satu bentuk pendalaman ilmu yang telah diperoleh.

3. Penulisan ini bertujuan untuk mengeksplor lebih dalam mengenai bagaimana pemerintah Swedia mengeluarkan kebijakan untuk mendukung Palestina.
4. Untuk melengkapi tugas akhir penulis.
5. Ditujukan untuk memenuhi persyaratan akademis untuk menyelesaikan studi kesarjanaan (strata 1) Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

F. Jangkauan Penelitian

Dalam suatu tulisan ilmiah selalu diperlukan pembatasan masalah guna menghindari terjadinya disintegrasi dan berimplikasi jika ruang lingkup pembahasan tidak dibatasi. Oleh karena itu dalam setiap penulisan ilmiah selalu dibutuhkan pembatasan masalah atau dengan mengadakan jangkauan penelitian.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis membatasi tulisan ini tentang Pengaruh kelompok muslim Swedia terhadap kebijakan Swedia dalam membantu pembangunan di Palestina pada tahun 2009 hingga tahun 2016.

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pola deskriptif sebagai metode penelitiannya. Penelitian deskriptif merupakan metode dalam penulisan yang akan meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem, suatu pemikiran atau kilas balik peristiwa pada masa sekarang yang bertujuan untuk mendeskripsikan gambaran secara sistematis

dan akurat mengenai fakta-fakta dan hubungan atas fenomena yang diteliti. Oleh karena itu penulisan dalam karya tulis ini bersifat studi pustaka karena yang diteliti adalah bahan-bahan yang sudah ditulis.

2. Sumber Data

Dalam tulisan ini penulis mengambil data yang bersifat sekunder. Yaitu data-data yang dijadikan bahan dalam tulisan ini bersumber dari arsip, majalah, internet, dokumen pribadi dan lain-lain mengingat yang menjadi penelitian penulis merupakan fenomena yang baru dan sedang akan berlangsung.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif yang berarti melalui kerangka teori yang ada ditarik suatu argumen utama yang selanjutnya akan dibuktikan dengan data-data empiris yang ada. Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa pengumpulan data bersifat sekunder.

H. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan penelitian yang telah di selesaikan oleh penulis menggunakan sistematika yang terdiri dari 5 bab pembahasan yang dimana tiap-tiap babnya membahas beberapa sub-pokok bahasan, diantaranya yaitu :

BAB I : Di bab pertama terdiri dari beberapa poin yaituPendahuluan latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka dasar teori, argumen utama, tujuan penelitian, jangkauan

penelitian, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II : Di bab kedua penulis akan memberikan informasi dan menjelaskan mengenai tragedi pembangunan Palestina pasca konflik yang dimana terdiri dari sub bab yang menjelaskan dampak ekonomi akibat perang pasca konflik kemudian membahas mengenai solidaritas global untuk Palestina dan yang terahir akan menjelaskan keterlibatan Swedia dalam pembangunan Palestina.

BAB III **:** Di bab ketiga penulis akan menjelaskan tentang respon kelompok muslim Swedia terhadap isu Palestina yang di awali dengan awal mula datangnya imigran muslim ke Swedia dan berbagai respon mengenai isu Palestina di Swedia yang dimana terdiri dari penjelasan respon konstituen domestik Swedia dan respon kelompok muslim Swedia.

BAB IV : Dalam bab ke empat akan menganalisis tentang bagaimana tekanan kelompok muslim terhadap politik luar negeri Swedia yang terdiri dari afiliasi kelompok muslim dengan konstituen domestik Swedia,kemudian penjabaran penjelasan dari adanya pengaruh muslim di Swedia dan tekanan dari konstituen domestik Swedia.

BAB V **:** Dan di bab terakhir berisi tentang kesimpulan dari pembahasan-pembahasan bab sebelumnya